

# Kasus Bansos Stagnan

**PONTIANAK** - Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia menilai pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Bansos KONI Kalbar yang ditangani Polda Kalbar jalan ditempat. Karena itu LAKI mendesak Polda segera mengungkap keterlibatan semua aktor dalam kasus tersebut dengan segera.

"Pentetapan satu orang tersangka belum cukup dalam mengusut kasus Bansos. Tentu banyak pihak yang terlibat. Maka, Polda mesti mempunyai langkah progress jelas agar pengusutannya tidak terkesan jalan di tempat," kata ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah di Pontianak, kemarin.

Menurut dia, pengusutan kasus Bansos merupakan perhatian publik. Karena terindikasi melibatkan orang besar. Dan penanganan kasusnya sempat ulur tarik. Mulai polisi yang menangani hingga KPK. Sebelum kembali ditangani Polda melalui pelimpahan secara resmi dari KPK.

Burhan menambahkan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Bansos KONI

pihakyang mempunyai peran sentral perlu dengan segera dipanggil.

Karena keterangannya dianggap dapat menjadi penentu. Dalam membuka tabir kasus tersebut agar segera menemui titik terang.

Burhan mengatakan mantan ketua KONI atau ketua cabang olahraga setidaknya turut Polda mintai keterangan. Kalau memang mengindikasikan keterlibatan pejabat maupun mantan pejabat tetap harus jelas penanganannya. Sebab semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum.

"Dalam proses hukum memang wajib mengedepankan dugaan tidak bersalah. Tapi bukan berarti kebal hukum. Jadi pengusutan kasus dugaan korupsi merupakan upaya dalam penegakkan hukum. Dan menangani dugaan penyimpangan Dana Bansos menjadi pertaruhan Polda kepada masyarakat. Untuk mengusutnya hingga tuntas," kata Burhan.

Menurut Burhan aktor utama mesti mampu diungkap. Agar satu tersangka yang sudah ditetapkan tidak terkesan

sebagai tumbal. Tapi semua pihak yang mempunyai peran dan keterlibatan mesti diungkap. "Bukan hanya penetapan tersangka mantan Wakil Bendahara KONI," kata dia.

Dugaan korupsi Dana Bansos kali pertama mencuat berdasarkan hasil temuan audit BPK. Kerugian negara senilai Rp22,14 miliar itu total dari APBD Provinsi tahun 2006 hingga 2008. Hasil telaah itu mencakup penggunaan keuangan daerah oleh DPRD Kalbar periode 2004-2009 terindikasi kerugian daerah Rp10,07 miliar.

Kedua, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pra PON sebesar Rp1,368 miliar. Ketiga, pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pelatda PONXVII sebesar Rp8,59 miliar.

Terakhir, ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp2,114 miliar. Khusus-kasus pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada satgas pra PON sebesar Rp1,368 miliar. (*stm*)